

## **Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kebumen**

**Firdaus Ananda Irawan, S. Agus Santoso**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: firdaus29@student.uns.ac.id

### **Abstrak**

Disdukcapil Kabupaten Kebumen menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), namun dalam penerapannya masih terdapat kendala yaitu, ketidakakuratan data kependudukan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi oleh George C. Edward III (1980) yang berfokus pada dimensi komunikasi dan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi SIAK sudah optimal dengan proses registrasi yang cepat, akses informasi yang mudah, serta adanya pelatihan dan panduan. Penerapan SOP meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Namun, dari sisi sumber daya, jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban kerja, meskipun operator SIAK sudah menguasai tugas. Ruang tunggu nyaman tapi kurang memadai, dan meskipun komputer dan internet berfungsi baik, kondisi fingerprint memprihatinkan karena penggunaan yang intensif.

**Kata Kunci** : Implementasi, SIAK, Tertib Administrasi.

### **Abstract**

Disdukcapil Kebumen Regency uses the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). However, its implementation still faces challenges, including inaccurate population data and low public awareness of the importance of civil documents. This study employs the Implementation Theory by George C. Edward III (1980), focusing on the dimensions of communication and resources. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods include interviews, observation, and documentation. The analysis technique follows the Miles and Huberman model (2014). The research findings show that the communication factor in the implementation of SIAK is optimal, with fast registration processes, easy access to information, and the presence of training and guidelines. The application of Standard Operating Procedures (SOP) improves efficiency and work quality. However, in terms of resources, the number of staff is disproportionate to the workload, although SIAK operators are proficient in their tasks. The waiting room is comfortable but insufficient,

and while computers and internet are functioning well, the condition of fingerprint scanners is concerning due to intensive use.

**Keywords:** Implementation, SIAK, Orderly Administration.

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan persebaran yang tidak merata, yang sering menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Penduduk Indonesia mencakup semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang berencana menetap walaupun baru berdomisili kurang dari enam bulan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, yang menjadi faktor penambah atau pengurang jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara faktor yang menambah dan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar (Subri, 2003:16).

Administrasi kependudukan bertujuan mengelola data penduduk secara tertib melalui dokumen yang standar dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Hal ini meliputi pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mengelola data secara akurat dan efisien, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk UU No. 24 Tahun 2013. Pentingnya sistem ini adalah untuk memastikan bahwa data kependudukan dapat dijadikan dasar yang valid bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Keselarasan antara jumlah penduduk yang besar dan kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan mencapai kemajuan bangsa.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan persebaran tidak merata, sering menghadapi masalah kependudukan yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Penduduk Indonesia mencakup mereka yang tinggal lebih dari enam bulan atau yang berencana menetap. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh empat faktor utama: kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Persebaran yang tidak merata dan kualitas sumber daya manusia yang rendah memperparah masalah kependudukan.

Administrasi kependudukan bertujuan mengelola data penduduk secara tertib dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Hal ini mencakup pencatatan berbagai peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, yang bersifat publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013, diterapkan untuk memastikan akurasi data kependudukan. Keselarasan antara jumlah penduduk dan

kualitas sumber daya manusia yang baik sangat penting bagi kemajuan negara, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung e-government, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem ini bertujuan untuk menata dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi yang mendukung layanan publik dan kebijakan pemerintah. Merujuk pada pernyataan Silaban (2021:15) Suatu hal yang penting dalam administrasi kependudukan melibatkan penyelenggaraan berbagai aspek, termasuk kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, kematian, perceraian, verifikasi anak, dan peristiwa lain yang wajib dicatat dalam pencatatan sipil. SIAK dirancang untuk menghasilkan data yang akurat mengenai jumlah penduduk, ekonomi, dan pendidikan, yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Dokumen kependudukan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan menjadi bukti autentik status seseorang sebagai warga negara. Di Kabupaten Kebumen, pelaksanaan SIAK diatur melalui Peraturan Bupati No. 107 Tahun 2013. Setiap penduduk diwajibkan memiliki dokumen kependudukan yang memuat informasi pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan tanggal lahir, yang memastikan hak mereka sebagai warga negara, termasuk mendapatkan pelayanan publik yang setara.

<b>Tahun</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>BPS</b>
2020	1.394.038	1.350.437
2021	1.406.606	1.361.913
2022	1.421.143	1.376.825

### **Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen**

*Sumber : BPS Kabupaten Kebumen*

Data menunjukkan adanya perbedaan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2021, Disdukcapil mencatat 1.406.606 jiwa, sementara BPS melaporkan 1.361.913 jiwa. Pada tahun 2022, Disdukcapil mencatat 1.421.143 jiwa, sedangkan BPS melaporkan 1.376.825 jiwa. Perbedaan ini menciptakan ketidakakuratan data yang menyulitkan dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintah.

Akibatnya, kebijakan yang bergantung pada data kependudukan dapat terhambat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketidakadaan dokumen kependudukan dapat mengakibatkan penduduk kehilangan hak-haknya dan pemerintah kesulitan melaksanakan program pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem administrasi kependudukan yang terstruktur dan konkret agar tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan berjalan efisien, bertanggung jawab, dan terorganisir. Oleh

karena itu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen, maka digunakan model implementasi kebijakan George C Edward III (1980) yang berfokus pada dimensi komunikasi yang terdiri dari transisi, kejelasan, dan konsistensi kemudian dimensi sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana pendukung.

### **Metodologi**

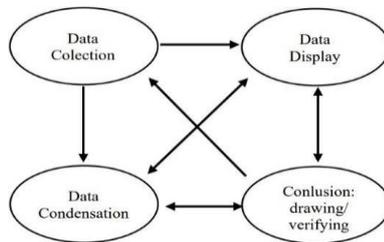
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lokasi tersebut merupakan tujuan utama masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen, sehingga dapat memperoleh data yang relevan terkait permasalahan kependudukan akibat ketidakakuratan data yang valid.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2011:60) mengungkapkan bahwasanya penelitian kualitatif dilaksanakan supaya mengilustrasikan serta melaksanakan analisis pada peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran seseorang maupun kelompok.

Informasi penelitian ini bersumber dari ucapan dan perbuatan informan melalui sesi wawancara, sementara informasi tambahan melibatkan data tertulis dan rekaman (Moleong, 2014:157). Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara media. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan lapangan, termasuk observasi dan wawancara pada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disusun untuk memahami dan menganalisis tahapan implementasi SIAK di Disdukcapil Kabupaten Kebumen. Informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh tidak langsung dan berbentuk Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kebumen.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan yakni triangulasi.

Dalam konteks penelitian, analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengelompokan, penyusunan, dan pemilihan informasi penting untuk memudahkan interpretasi dan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data terdiri dari tiga fase: merangkum data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.



Gambar Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana Sumber: Analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33)

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Impelementasi SIAK di Kabupaten Kebumen Proses Registrasi Kependudukan

Kebijakan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan secara teratur, termasuk pengelolaan database, penerbitan NIK, dan dokumen kependudukan. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Di Kabupaten Kebumen, implementasi kebijakan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, hingga pengelolaan informasi melalui SIAK untuk menghasilkan data yang akurat dan digunakan dalam pelayanan publik.

Proses pendaftaran penduduk di Kebumen melibatkan pencatatan data dasar pribadi, status kewarganegaraan, serta perubahan data seperti alamat dan status pernikahan. Pendaftaran ini bertujuan agar setiap penduduk tercatat resmi dalam database kependudukan dan dapat memperoleh dokumen resmi, seperti KTP atau akta kelahiran. Proses dimulai dengan verifikasi data dari Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan keakuratan informasi sebelum diinput ke sistem SIAK.

Pencatatan peristiwa kependudukan meliputi kelahiran, kematian, dan perpindahan tempat tinggal. Pencatatan kelahiran menghasilkan Akta Kelahiran, dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi. Pencatatan kematian bertujuan memperbarui status kependudukan dan mengeluarkan Akta Kematian. Pindah datang penduduk juga dicatat untuk memastikan data selalu sesuai dengan domisili terbaru.

Keamanan dan kerahasiaan data kependudukan sangat dijaga melalui berbagai langkah pengamanan di Disdukcapil Kebumen. Pelatihan rutin diberikan kepada pegawai, sementara teknologi seperti enkripsi dan firewall digunakan untuk melindungi data dari akses tidak sah. Pengawasan aktivitas data dilakukan melalui log aktivitas yang mencatat setiap perubahan.

Penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP dan NIK, merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen pendukung dan pengelolaan database melalui SIAK, yang memastikan setiap penduduk memiliki identitas yang sah dan dapat mengakses berbagai layanan publik.

Kesimpulannya, Kebijakan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan yang terstruktur, mencakup pengelolaan database, penerbitan NIK, dan dokumen kependudukan. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kebumen memastikan pengelolaan data yang akurat untuk mendukung pelayanan publik. Proses pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan, serta penerbitan dokumen resmi seperti KTP dan Akta Kelahiran dilakukan dengan verifikasi ketat dan pengamanan data. Penggunaan teknologi seperti enkripsi serta pengawasan log aktivitas menjaga keamanan dan kerahasiaan data, didukung dengan pelatihan rutin bagi petugas.

### **Proses Pengelolaan Database Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Database Kependudukan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini mendukung pengelolaan data kependudukan di berbagai tingkat wilayah pemerintahan. Dengan adanya SIAK, data kependudukan dapat dikelola dengan lebih teratur dan efisien, dari tingkat kecamatan/kelurahan hingga ke kabupaten/kotamadya, meskipun wilayahnya terpisah secara geografis.

SIAK memungkinkan integritas data tetap terjaga karena seluruh data disimpan terpusat di Internet Data Center. Sistem ini berperan penting dalam menangani perubahan status penduduk serta pembaruan data, yang dilakukan secara real-time dan terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Sistem ini mengelola semua aspek terkait data penduduk, mencakup pendataan dan pencatatan sipil, serta memberikan data yang akurat untuk berbagai kebutuhan publik dan pemerintah.

Pengumpulan data melalui SIAK di Kabupaten Kebumen meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Dengan dukungan perangkat keras seperti komputer, scanner, dan perangkat biometrik, proses pengumpulan data menjadi lebih cepat dan akurat. Data penduduk diinput ke dalam sistem secara langsung, mulai dari informasi kelahiran, kematian, perkawinan, hingga perpindahan penduduk, sehingga mempercepat proses pendaftaran penduduk.

Pemeliharaan dan pengamanan data dilakukan dengan ketat melalui pencadangan harian, pengawasan log aktivitas, serta pemantauan perubahan data yang dicatat dalam SIAK. Setiap perubahan yang dilakukan tercatat secara rinci, sehingga setiap aktivitas dapat diawasi dengan jelas. Prosedur ini menjamin keamanan data, memastikan keakuratan informasi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

## **2. Faktor yang Memengaruhi Implementasi SIAK**

Suatu kebijakan publik tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Ada berbagai proses atau tahapan yang harus dilalui, dan implementasi merupakan bagian yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik bukanlah hal yang sederhana karena terdapat beragam faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hal ini juga berlaku dalam kebijakan Administrasi Kependudukan, yang dalam penerapannya menghadapi berbagai tantangan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen, maka digunakan model implementasi kebijakan George C Edward III. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai dimensi yang berfokus pada dimensi komunikasi dan sumberdaya:

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Informasi terkait kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen harus disampaikan kepada instansi yang relevan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Penyampaian ini penting agar pihak terkait dapat memahami langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tertib administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Komunikasi mempunyai peran serta fungsi yang besar untuk implementasi bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Dalam pandangan Edward III, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga hal penting, yaitu:

##### **1. Transmisi**

Transmisi adalah adanya penyaluran informasi atau pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen dapat tersampaikan pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan cara pemberian instruksi.

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki peran yang sangat penting dalam mempermudah pengelolaan administrasi kependudukan. SIAK dianggap sebagai sistem yang lengkap karena mampu melakukan berbagai fungsi, seperti verifikasi, penambahan data baru, dan penghapusan data lama. Namun, meskipun SIAK merupakan sistem yang baik, keberhasilannya sangat bergantung pada keterampilan dan pemahaman pegawai yang mengoperasikannya, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

##### **2. Kejelasan**

Kejelasan informasi merupakan elemen fundamental dalam komunikasi, terutama ketika informasi tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan di masa mendatang. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, aspek kejelasan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas terkaik implementasi SIAK. Kejelasan yang dimaksud tidak hanya merujuk pada penyampaian pesan, instruksi, dan tujuan yang berkaitan dengan SIAK, tetapi juga mencakup bagaimana informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan informasi yang terjaga memungkinkan implementasi SIAK dapat berjalan lebih optimal, mengurangi

risiko kesalahpahaman, dan memperkuat koordinasi dalam mencapai tertib administrasi kependudukan.

Kesimpulannya bahwa akses informasi terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kebumen cukup mudah dan terstruktur. Informasi mengenai SIAK disediakan oleh pemerintah melalui dokumen, panduan, pelatihan, dan bimbingan teknis, sehingga memudahkan pemahaman dan pelaksanaan sistem tersebut. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya dalam mengoperasikan fitur-fitur dan memahami prosedur dalam SIAK. Selain itu, dukungan teknis juga tersedia untuk menangani kendala atau pertanyaan yang mungkin muncul selama operasional, sehingga memastikan kelancaran implementasi SIAK di lapangan.

### **3. Konsistensi**

Aspek konsistensi mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dilakukan secara terstruktur oleh seluruh staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Konsistensi yang dijaga dalam penerapan prosedur dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjaga integritas data kependudukan. Pemberian informasi yang konsisten juga memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pegawai memiliki pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam melayani masyarakat. Dengan menerapkan standar waktu penyelesaian tugas yang konsisten, proses pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Efisiensi waktu yang terukur ini juga membantu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dari kalimat di atas menjelaskan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sangat penting untuk menjaga integritas dan memastikan komitmen operator, dan pejabat dalam mengikuti SOP yang telah ditetapkan. SOP tidak hanya membantu mempercepat proses pelayanan, tetapi juga berperan dalam meminimalisir kesalahan kinerja. SOP yang konsisten akan berpengaruh pada proses kerja menjadi lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan, dan menyatukan pemahaman di antara pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa SOP berfungsi sebagai panduan utama dalam menjaga kualitas dan efisiensi pelayanan kependudukan.

#### **b. Sumber Daya**

Dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan merujuk pada semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Sumber

daya ini mencakup berbagai aspek seperti manusia, material, dan sarana penunjang. Dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, dimensi sumber daya ini sangat penting untuk memastikan layanan publik, seperti pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, dan administrasi kependudukan lainnya, berjalan dengan baik dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kebumen dalam bidang administrasi kependudukan. Adapun focus dalam penelitian ini dalam dimensi sumber daya adalah staff dan fasilitas karena dua aspek ini sangat berpengaruh dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen.

### **1. Sumber daya manusia**

Pegawai merupakan sumber daya yang memiliki peran krusial dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Kebijakan atau program tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak yang melaksanakannya. Dalam proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan, keterlibatan manusia sangat penting. Pelaksanaan kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia, agar pegawai tidak terbebani dengan pekerjaan yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi kerja.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah meskipun ketersediaan staf yang dibutuhkan masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan beban kerja yang sangat besar, operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dimungkinkan berkat adanya bantuan dari mahasiswa atau peserta program magang (PKL). Sedangkan untuk bagian operator SIAK sudah berjalan dengan baik dapat dilihat kemampuan operator SIAK dalam menjalankan tugasnya.

### **2. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas dan infrastruktur merupakan sumber daya penting yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi suatu kebijakan. Fasilitas seperti ruang tunggu, tempat duduk, dan sarana pendukung lainnya memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam kegiatan perekaman data penduduk dibutuhkan perangkat keras dan lunak, jaringan komunikasi data dan alat perekam baik perekam sidik jari maupun pemindai retina mata. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah alat perekam sidik jari, karena frekuensi penggunaannya bisa mencapai ratusan orang perhari.

### **Penutup**

Dimensi komunikasi pada implementasi SIAK di Kabupaten Kebumen sudah baik yang dilihat dari transisi, kejelasann, dan konsistensi, namun, sumber daya dalam implementasi SIAK masih menghadapi beberapa kendala. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai pelayanan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan, yang mencapai 400 orang per hari. Dari segi sarana dan prasarana, ruang tunggu

kurang memadai, dan gangguan internet sering menghambat layanan. Alat perekam sidik jari untuk KTP juga rentan rusak karena penggunaan yang tinggi. Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan dan rekrutmen tambahan diperlukan dan pengembangan kompetensi khusus terkait sistem informasi administrasi kependudukan untuk menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan pelayanan.
2. Memperluas ruang tunggu di kantor pelayanan agar mampu mengakomodasi jumlah masyarakat yang semakin meningkat.
3. Pemeliharaan rutin dan penggantian alat perekam sidik jari (fingerprint) yang sudah usang untuk menghindari kerusakan.

### **Referensi**

- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Mulyanto, Agus. (2009). *Sistem Informasi: Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati No. 107 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Silaban, S. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). *Jurnal Niara*, 16(2)
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan